Jurnal Impresi Indonesia (JII)
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5. No. 6. 2026

Geopolitik Asia Tenggara dan Posisi Strategis Indonesia: Analisis Kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok dalam Perspektif Realisme Struktural

Rahmad Maulana*, Puspitasari
Universitas Indonesia
Email: rahmatmaulanaaswan999@gmail.com*

Keywords:
Geopolitics; Southeast Asia; Indonesia; United States; China; Structural Realism.

Abstract

This article examines the geopolitical dynamics of Southeast Asia by focusing on Indonesia's strategic position amid the rivalry between the United States and China. Southeast Asia occupies a pivotal role in global politics due to its function as a major international trade route and as a key arena of great power competition. This study adopts a qualitative approach through a literature review and applies structural realism as the main theoretical framework to analyze power distribution and state strategies within an anarchic international system. The findings show that U.S.–China competition extends across military, economic, technological, and diplomatic domains, significantly shaping regional stability. As a middle power, Indonesia adopts a hedging strategy as conceptualized by Kuik Cheng-Chwee, enabling it to maintain simultaneous engagement with both major powers while avoiding exclusive alignment. This strategy is complemented by multilateral diplomacy and efforts to strengthen domestic capabilities, in line with Indonesia's free and active foreign policy. The study concludes that structural realism provides an effective analytical lens for explaining Indonesia's strategic behavior in navigating an increasingly bipolar international system while managing vulnerabilities to national resilience.

Kata Kunci:
Geopolitik; Asia Tenggara; Indonesia; Amerika Serikat; Cina; Realisme Struktural.

Abstrak

Artikel ini mengkaji dinamika geopolitik Asia Tenggara dengan berfokus pada posisi strategis Indonesia di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China. Asia Tenggara menempati peran penting dalam politik global karena fungsinya sebagai rute perdagangan internasional utama dan sebagai arena utama persaingan kekuatan besar. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur dan menerapkan realisme struktural sebagai kerangka teoritis utama untuk menganalisis distribusi kekuasaan dan strategi negara dalam sistem internasional yang anarkis. Temuan ini menunjukkan bahwa persaingan AS-Tiongkok meluas di seluruh domain militer, ekonomi, teknologi, dan diplomatik, yang secara signifikan membentuk stabilitas regional. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia mengadopsi strategi lindung nilai seperti yang dikonseptualisasikan oleh Kuik Cheng-Chwee, yang memungkinkannya untuk mempertahankan keterlibatan simultan dengan kedua kekuatan besar sambil menghindari penyelarasan eksklusif. Strategi ini dilengkapi dengan diplomasi multilateral dan

upaya penguatan kapabilitas dalam negeri, sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Studi ini menyimpulkan bahwa realisme struktural memberikan lensa analitis yang efektif untuk menjelaskan perilaku strategis Indonesia dalam menavigasi sistem internasional yang semakin bipolar sambil mengelola kerentanan terhadap ketahanan nasional.

PENDAHULUAN

Asia Tenggara merupakan kawasan dengan posisi geopolitik yang sangat strategis karena menjadi jalur utama perdagangan global, terutama melalui Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi ini menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat perhatian kekuatan besar dunia dalam menjaga stabilitas dan mengamankan kepentingannya (Anwar, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok semakin intens di kawasan ini, baik dalam bidang militer, ekonomi, teknologi, maupun diplomasi (Buszynski, 2019). Amerika Serikat berupaya mempertahankan hegemoninya dengan strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP), sementara Tiongkok memperluas pengaruhnya melalui inisiatif Belt and Road (BRI) dan klaim teritorial di Laut Cina Selatan (Buszynski & Hai, 2021; Carr, 2014).

Indonesia memiliki posisi yang unik dalam dinamika ini. Secara geografis, Indonesia terletak di titik silang Indo-Pasifik dengan kekayaan sumber daya alam dan jalur laut yang vital bagi perdagangan dunia (Dollar, 2019). Selain itu, Indonesia juga memainkan peran penting dalam ASEAN, yang menjadikannya salah satu aktor kunci dalam menjaga sentralitas kawasan. Oleh karena itu, analisis terhadap posisi strategis Indonesia dalam kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok sangat penting (Goh, 2013; Hillman, 2021; Shambaugh, 2020; Solís, n.d.; Sukma, 2010). Untuk memahami fenomena ini, penelitian menggunakan teori realisme struktural yang menekankan distribusi kekuatan dalam sistem internasional.

Kajian mengenai rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan keamanan di Laut Cina Selatan dan dinamika ASEAN. Misalnya, Evelyn Goh menekankan bahwa negara-negara Asia Tenggara menghadapi dilema keamanan yang semakin kompleks akibat rivalitas dua kekuatan besar tersebut (Institute, 2023; Kuik, 2008). Penelitian lain oleh (Sukma, 2020) menunjukkan bagaimana Indonesia mencoba memainkan peran sebagai penengah dalam sengketa regional, meskipun sering kali terbatas oleh kepentingan nasional dan tekanan eksternal.

Selain itu, sejumlah penelitian juga menyoroti strategi Indonesia dalam menghadapi kekuatan besar. Konsep hedging strategy yang dikemukakan oleh Kuik Cheng-Chwee menjelaskan bagaimana negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memilih jalur kebijakan yang tidak sepenuhnya condong ke satu pihak, tetapi berusaha menjaga keseimbangan kepentingan dengan kedua kekuatan besar (Kuik, 2021; Laksmana, 2013; Lohman, 2013; Reid, 1993). Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut cenderung deskriptif dan belum secara eksplisit menggunakan kerangka realisme struktural untuk menganalisis strategi Indonesia. Hal ini menjadi celah yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada penggunaan kerangka realisme struktural secara eksplisit dan sistematis untuk menganalisis posisi strategis Indonesia di tengah rivalitas AS-China. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif atau menggunakan pendekatan konstruktivis dan liberal, penelitian ini secara konsisten

menggunakan tiga konsep kunci realisme struktural: (1) anarki sistem internasional, (2) distribusi kapabilitas kekuatan, dan (3) strategi rasional negara untuk bertahan hidup (survival). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan strategi hedging Indonesia, tetapi juga menjelaskan mengapa strategi tersebut merupakan respons rasional dan tak terelakkan dalam struktur sistem internasional yang semakin bipolar. Hal ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan bagi studi Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami perilaku middle power di Asia Tenggara.

Kerangka teori yang digunakan adalah realisme struktural atau neorealisme sebagaimana dirumuskan oleh Kenneth Waltz. Dalam perspektif ini, sistem internasional dipandang bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas tertinggi di atas negara. Oleh sebab itu, distribusi kapabilitas kekuatan di antara negara-negara menjadi faktor utama dalam menentukan perilaku politik luar negeri. Dalam konteks kompetisi global, negara akan memilih strategi tertentu untuk bertahan hidup, baik melalui balancing (menyeimbangkan kekuatan lawan), bandwagoning (mengikuti kekuatan dominan), maupun hedging (menjaga hubungan dengan semua pihak secara fleksibel).

Perspektif ini relevan untuk menganalisis kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok di Asia Tenggara. Rivalitas keduanya tidak hanya membentuk konfigurasi geopolitik kawasan, tetapi juga menciptakan tekanan bagi negara-negara menengah seperti Indonesia. Dalam kerangka realisme struktural, Indonesia dapat dilihat sebagai middle power yang berusaha memanfaatkan posisinya untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus menjaga stabilitas kawasan di tengah struktur internasional yang semakin bipolar dan multipolar.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori yang telah dipaparkan, penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana bentuk kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam dimensi militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Kedua, bagaimana posisi strategis Indonesia dalam rivalitas tersebut, mengingat perannya yang penting baik secara geografis maupun geopolitik. Ketiga, bagaimana perspektif realisme struktural dapat menjelaskan peran dan strategi yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi kompetisi dua kekuatan besar tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk mendeskripsikan dinamika kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara yang semakin menguat dalam berbagai aspek. Kedua, untuk menganalisis posisi strategis Indonesia dalam konteks rivalitas tersebut, baik dari segi kepentingan nasional maupun peran kawasan. Ketiga, untuk menjelaskan analisis tersebut dengan menggunakan kerangka realisme struktural, sehingga dapat memberikan pemahaman teoretis yang lebih mendalam mengenai perilaku Indonesia dalam sistem internasional yang anarkis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya khazanah kajian geopolitik kontemporer di Asia Tenggara, khususnya dengan penerapan teori realisme struktural dalam menganalisis strategi Indonesia. Hal ini penting karena sebagian besar kajian sebelumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara konsisten menggunakan kerangka teoretis tersebut. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Indonesia dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama dalam menjaga keseimbangan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta sentralitas ASEAN.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu ditegaskan agar ruang lingkup analisis tetap terfokus. Pertama, kajian ini dibatasi pada analisis posisi strategis Indonesia dalam konteks rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, sehingga tidak membahas secara mendalam dinamika kebijakan luar negeri negara-negara ASEAN lainnya secara komparatif. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data primer maupun pengukuran kuantitatif terhadap efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia. Ketiga, analisis difokuskan pada periode kontemporer, khususnya perkembangan sebelum dan setelah pandemi COVID-19, dengan menekankan implikasi rivalitas kekuatan besar terhadap ketahanan nasional Indonesia, terutama dalam dimensi ekonomi dan geopolitik. Dengan batasan tersebut, penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai kedaulatan negara secara normatif, melainkan untuk mengkaji kerentanan dan tantangan terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam struktur internasional yang semakin bipolar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kepustakaan (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial-politik secara mendalam dan holistik, serta menekankan pada pemahaman makna di balik interaksi antaraktor dalam sistem internasional. Analisis kepustakaan digunakan untuk menelaah berbagai literatur akademik yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan lembaga riset, serta dokumen resmi pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan, melainkan pada konstruksi pemahaman teoretis dan analitis atas isu geopolitik Asia Tenggara.

Kerangka teoritis yang digunakan adalah realisme struktural atau neorealisme yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz. Teori ini menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi di atas negara, sehingga distribusi kapabilitas kekuatan menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku negara. Dengan realisme struktural, penelitian ini menganalisis bagaimana kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara membentuk struktur kekuasaan regional, serta bagaimana posisi strategis Indonesia dapat dipahami dalam konteks tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, meliputi jurnal internasional bereputasi, laporan lembaga pemikir (think tank) seperti CSIS, ISEAS, dan SIPRI, dokumen resmi pemerintah Indonesia serta ASEAN, serta berita terkini dari media terpercaya. Data-data ini dipilih karena memiliki otoritas akademik maupun kebijakan yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika geopolitik Asia Tenggara.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan mengkaji tiga aspek utama sesuai kerangka realisme struktural: pertama, struktur internasional yang berhubungan dengan distribusi kekuatan (distribution of power); kedua, kapabilitas negara yang mencakup dimensi militer, ekonomi, dan diplomasi; ketiga, strategi negara dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar, seperti balancing, hedging, dan bandwagoning. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana Indonesia memosisikan diri di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok di Asia Tenggara

Kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara semakin intens dalam dua dekade terakhir, mencerminkan perubahan tatanan global dari unipolaritas menuju multipolaritas. Amerika Serikat, setelah berakhirnya Perang Dingin, berupaya mempertahankan hegemoninya dengan mengandalkan aliansi militer dan kemitraan strategis di kawasan (Walt, 1985; Waltz, 1979). Melalui strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Washington menekankan pentingnya supremasi hukum internasional, kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, serta penolakan terhadap klaim sepihak Tiongkok. Pendekatan ini diwujudkan dengan memperkuat kerja sama pertahanan dengan Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta meningkatkan kehadiran militernya di jalur strategis Asia Tenggara.

Di sisi lain, Tiongkok mengedepankan kekuatan ekonomi sebagai instrumen geopolitiknya. Melalui inisiatif Belt and Road Initiative (BRI), Beijing mengucurkan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan, jalan raya, kereta api, dan proyek energi di sejumlah negara ASEAN seperti Laos, Kamboja, Myanmar, dan Indonesia (Bank, 2023; Creswell, 2018). Inisiatif ini memperluas jejaring ketergantungan ekonomi negara-negara Asia Tenggara terhadap Tiongkok, yang pada akhirnya meningkatkan daya tawar Beijing dalam diplomasi regional. Namun, ekspansi Tiongkok di Laut Cina Selatan, termasuk pembangunan pulau buatan dan penempatan instalasi militer, menimbulkan ketegangan serius dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei, sekaligus menjadi tantangan bagi prinsip sentralitas ASEAN.

Selain aspek militer dan ekonomi, rivalitas juga mencakup sektor teknologi dan diplomasi. Amerika Serikat menggalang aliansi teknologi melalui inisiatif Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diluncurkan pada 2022, dengan fokus pada perdagangan digital, rantai pasok, dan energi bersih. Sementara itu, Tiongkok mengembangkan Digital Silk Road sebagai bagian dari BRI, dengan investasi pada infrastruktur telekomunikasi dan jaringan 5G, terutama melalui perusahaan Huawei. Kompetisi teknologi ini menambah dimensi baru rivalitas, karena negara-negara Asia Tenggara harus menimbang antara keuntungan ekonomi dan risiko keamanan dalam memilih mitra.

Dampak dari persaingan ini bersifat ambivalen bagi Asia Tenggara. Di satu sisi, negara-negara ASEAN memperoleh manfaat berupa akses pada investasi, teknologi, serta dukungan keamanan. Di sisi lain, mereka menghadapi dilema geopolitik: bagaimana menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan tanpa harus terjebak dalam kubu salah satu kekuatan besar. Bagi Indonesia khususnya, rivalitas ini menuntut strategi politik luar negeri yang berhati-hati, fleksibel, dan konsisten dengan prinsip bebas-aktif. Dengan kata lain, kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok di Asia Tenggara bukan sekadar pertarungan global, tetapi juga persoalan regional yang menentukan masa depan stabilitas Indo-Pasifik.

Pada periode pasca pandemi COVID-19, intensitas rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara semakin meningkat. Gangguan rantai pasok global selama pandemi mendorong kedua negara memperluas persaingan dalam bidang perdagangan, teknologi, dan keamanan ekonomi, yang tercermin dari peluncuran Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) oleh Amerika Serikat serta penguatan Digital Silk Road oleh Tiongkok. Kondisi ini menunjukkan bahwa rivalitas geopolitik di Asia Tenggara memasuki fase baru yang semakin berorientasi pada kepentingan ekonomi dan teknologi.

Posisi Strategis Indonesia

Indonesia memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam percaturan geopolitik Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Secara geografis, Indonesia terletak di persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus menguasai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur vital perdagangan dunia. Lebih dari 40 persen perdagangan global melewati Selat Malaka dan perairan Nusantara, menjadikan Indonesia aktor kunci dalam menjaga keamanan maritim regional. Kondisi ini memberikan keuntungan geopolitik sekaligus tantangan besar, karena potensi ancaman keamanan maritim meningkat seiring dengan intensitas rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok.

Selain aspek geografis, Indonesia juga memiliki bobot ekonomi dan demografi yang memperkuat posisinya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan PDB terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki daya tarik sebagai pasar sekaligus mitra ekonomi strategis. Tiongkok menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra utama dalam Belt and Road Initiative (BRI), khususnya pada proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Sementara Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dalam strategi Indo-Pasifik, terlihat dari kerja sama ekonomi, investasi, dan program keamanan maritim. Kombinasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif unik dibanding negara ASEAN lainnya.

Namun, penguatan posisi ekonomi ini juga menciptakan ketergantungan struktural. Dalam satu dekade terakhir, Tiongkok muncul sebagai mitra dagang utama Indonesia sekaligus salah satu sumber investasi terbesar, sehingga membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri Indonesia. Ketergantungan ekonomi ini menyempitkan ruang manuver Indonesia, karena pengambilan sikap yang terlalu konfrontatif terhadap Tiongkok berpotensi menimbulkan dampak ekonomi domestik yang signifikan.

Dalam diplomasi kawasan, Indonesia memainkan peran sentral melalui ASEAN. Sebagai negara dengan pengaruh besar di organisasi tersebut, Indonesia berupaya menjaga prinsip ASEAN centrality agar kawasan tidak terpecah oleh kepentingan kekuatan besar. Melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), Indonesia menekankan pentingnya inklusivitas, dialog, dan kerja sama maritim, sekaligus menolak dominasi salah satu kekuatan. Upaya ini menegaskan identitas Indonesia sebagai middle power yang berperan sebagai penyeimbang (balancer) dalam menjaga stabilitas regional.

Perbedaan sikap negara-negara ASEAN terhadap Tiongkok, khususnya dalam isu Laut Cina Selatan, memperlihatkan keterbatasan ASEAN sebagai instrumen penyeimbang. Ketidaksamaan kepentingan ini menjadi contoh konkret bagaimana fragmentasi kawasan membatasi kemampuan Indonesia untuk mengandalkan diplomasi multilateral secara penuh dalam menghadapi rivalitas kekuatan besar.

Namun demikian, posisi strategis ini juga menghadirkan dilema kebijakan luar negeri. Indonesia tidak bisa sepenuhnya berpihak pada Amerika Serikat, karena ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok cukup besar. Di sisi lain, Indonesia juga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Tiongkok, karena isu Laut Cina Selatan dan potensi ancaman terhadap kedaulatan maritim nasional. Oleh karena itu, Indonesia menempuh strategi hedging, yaitu menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak sembari memperkuat kapasitas nasional dan kerja sama regional. Strategi ini dianggap paling realistis dalam menghadapi struktur internasional yang anarkis, sesuai dengan kerangka realisme struktural.

Selain itu, ketegangan di sekitar perairan Natuna Utara menunjukkan bahwa rivalitas kekuatan besar tidak hanya berdampak pada aspek kedaulatan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Mengingat ketergantungan Indonesia terhadap keamanan jalur perdagangan laut, eskalasi konflik maritim akan secara langsung mempersempit ruang manuver Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional.

Pada masa pasca pandemi COVID-19, kerentanan ekonomi Indonesia semakin terlihat. Gangguan rantai pasok global serta kebutuhan pemulihan ekonomi nasional meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan dan investasi eksternal, khususnya dari Tiongkok. Kondisi ini semakin mempersempit ruang manuver Indonesia, karena stabilitas ekonomi domestik sangat bergantung pada keberlanjutan hubungan ekonomi dengan mitra utama di tengah rivalitas kekuatan besar.

Pandemi COVID-19 secara signifikan memengaruhi posisi strategis Indonesia dalam rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Tekanan terhadap pemulihan ekonomi nasional membuat Indonesia semakin bergantung pada stabilitas perdagangan internasional dan arus investasi asing. Dalam kondisi ini, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung lebih berhati-hati dan pragmatis, karena setiap ketegangan geopolitik yang meningkat berpotensi berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Strategi Indonesia dalam Rivalitas AS–Tiongkok

Dalam menghadapi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia menempuh strategi politik luar negeri yang konsisten dengan prinsip bebas-aktif. Prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga otonomi dalam pengambilan kebijakan, tidak terjebak dalam blok tertentu, sekaligus tetap aktif dalam diplomasi internasional. Strategi tersebut diwujudkan melalui pendekatan hedging, yakni menjaga hubungan baik dengan kedua kekuatan besar, sambil menghindari ketergantungan berlebihan pada salah satunya. Pendekatan ini berbeda dari strategi balancing yang bersifat konfrontatif, maupun bandwagoning yang cenderung mengikuti dominasi salah satu pihak.

Dari sisi ekonomi, Indonesia berupaya memanfaatkan hubungan dengan Tiongkok untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui proyek Belt and Road Initiative, sembari tetap menjalin kemitraan dengan Amerika Serikat dalam hal perdagangan, investasi, dan kerja sama digital. Contoh konkret adalah proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang didanai oleh Tiongkok, sementara di saat yang sama Indonesia aktif dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diinisiasi Amerika Serikat. Strategi ini menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tetap membuka peluang diversifikasi mitra.

Namun, strategi ini juga memperlihatkan keterbatasan ruang manuver Indonesia, karena keterlibatan simultan dalam BRI dan IPEF menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap tekanan geopolitik. Dalam situasi eskalasi rivalitas, Indonesia berpotensi menghadapi dilema ekonomi apabila harus menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan kepentingan salah satu kekuatan besar.

Keterlibatan Indonesia secara bersamaan dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang didanai Tiongkok dan partisipasi dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diprakarsai Amerika Serikat menunjukkan secara konkret praktik strategi hedging Indonesia. Namun, contoh ini juga memperlihatkan keterbatasan ruang manuver Indonesia, karena

perubahan sikap terhadap salah satu pihak berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan politik yang signifikan.

Dalam bidang keamanan, Indonesia memperkuat kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui latihan militer bersama seperti Garuda Shield, namun tetap menghindari langkah yang dapat dianggap provokatif oleh Tiongkok. Indonesia juga terus mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui jalur diplomasi multilateral ASEAN dan mendorong percepatan Code of Conduct (CoC) dengan Tiongkok. Dengan cara ini, Indonesia berupaya menjaga stabilitas regional sekaligus melindungi kepentingan nasionalnya di perairan Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan zona klaim Tiongkok.

Latihan militer bersama Garuda Shield dengan Amerika Serikat menjadi contoh konkret bagaimana Indonesia memperkuat kerja sama pertahanan tanpa membentuk aliansi formal. Namun, pada saat yang sama, Indonesia tetap menahan diri dalam merespons aktivitas Tiongkok di perairan Natuna Utara agar tidak memicu eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi nasional.

Selain itu, strategi diplomasi Indonesia terlihat dalam perannya sebagai promotor ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Melalui dokumen ini, Indonesia menekankan pentingnya inklusivitas, kerja sama maritim, pembangunan berkelanjutan, serta penghormatan terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada hubungan bilateral dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga berupaya memperkuat posisi ASEAN sebagai aktor kolektif di kawasan.

Dalam konteks pasca pandemi, strategi hedging Indonesia tidak hanya mencerminkan pilihan normatif kebijakan bebas-aktif, tetapi juga merupakan respons terhadap tekanan ekonomi dan ketidakpastian global. Kebutuhan menjaga pemulihan ekonomi membatasi opsi kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga mempersempit ruang manuver dalam merespons rivalitas kekuatan besar secara lebih tegas.

Meskipun strategi hedging memungkinkan Indonesia memperoleh manfaat ekonomi dan diplomatik dari hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, strategi ini juga menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan nasional. Ketergantungan terhadap jalur perdagangan laut internasional serta investasi asing membuat ketahanan ekonomi Indonesia rentan terhadap gangguan geopolitik, khususnya apabila rivalitas kekuatan besar meningkat. Dengan demikian, strategi hedging tidak sepenuhnya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menciptakan titik-titik kerentanan struktural yang harus dikelola secara hati-hati.

Analisis Perspektif Realisme Struktural

Analisis kompetisi Amerika Serikat–Tiongkok di Asia Tenggara melalui perspektif realisme struktural menunjukkan bahwa dinamika kawasan ini sangat dipengaruhi oleh distribusi kapabilitas kekuatan global. Kenneth Waltz menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara bertindak berdasarkan kalkulasi rasional untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai dua kekuatan besar merepresentasikan struktur bipolar yang semakin nyata, di mana masing-masing berusaha memaksimalkan kapabilitas militer, ekonomi, dan diplomasi guna memperkuat posisinya.

Dalam konteks ini, Indonesia sebagai middle power berada dalam posisi dilematis. Realisme struktural menjelaskan bahwa negara dengan kapabilitas menengah akan berusaha menavigasi persaingan kekuatan besar dengan strategi yang tidak bersifat konfrontatif. Hal ini

tercermin dari pilihan Indonesia untuk tidak terlibat dalam aliansi pertahanan formal dengan Amerika Serikat, sekaligus menghindari ketergantungan penuh pada Tiongkok. Strategi hedging yang ditempuh Indonesia sesuai dengan logika realisme struktural, yakni meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dalam struktur kekuatan yang tidak seimbang.

Realisme struktural juga membantu menjelaskan keterbatasan peran Indonesia di tingkat global. Meskipun memiliki posisi geografis strategis dan bobot ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak dapat secara sepenuhnya mengubah konfigurasi kekuatan regional karena struktur internasional ditentukan oleh distribusi kapabilitas antara kekuatan besar. Dengan demikian, upaya Indonesia lebih difokuskan pada menjaga stabilitas kawasan melalui ASEAN dan mempromosikan norma inklusivitas dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Namun, perspektif realisme struktural juga menunjukkan potensi kerentanan Indonesia. Ketika distribusi kekuatan global semakin bipolar, ruang manuver negara middle power semakin terbatas. Indonesia berisiko menghadapi tekanan untuk berpihak pada salah satu kekuatan, terutama jika rivalitas AS–Tiongkok semakin meningkat dalam bidang militer. Dalam kondisi ini, pilihan Indonesia akan sangat bergantung pada kalkulasi kepentingan nasional, yang meliputi kedaulatan maritim, pembangunan ekonomi, dan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, strategi diplomasi bebas-aktif yang fleksibel tetap relevan, namun perlu didukung oleh penguatan kapabilitas domestik agar Indonesia tidak hanya menjadi objek perebutan pengaruh, melainkan juga aktor yang berdaya dalam struktur internasional.

Dalam konteks ini, ruang manuver Indonesia sebagai middle power semakin menyempit karena tekanan struktural yang berasal dari distribusi kapabilitas global. Ketergantungan ekonomi, fragmentasi kawasan ASEAN, serta meningkatnya rivalitas militer memperlihatkan bahwa strategi hedging Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari kerentanan terhadap ketahanan nasional, khususnya dalam dimensi ekonomi dan geopolitik. Dalam perspektif realisme struktural, lingkungan internasional pasca pandemi memperkuat kecenderungan bipolar dan mempersempit otonomi strategis negara-negara middle power seperti Indonesia. Isu pemulihan ekonomi, keamanan rantai pasok, dan kompetisi teknologi menjadi arena baru di mana tekanan struktural semakin membatasi pilihan kebijakan luar negeri Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa tekanan yang dihadapi Indonesia tidak semata-mata berupa ancaman terhadap kedaulatan, melainkan lebih pada kerentanan terhadap ketahanan nasional. Ketergantungan ekonomi, keamanan jalur perdagangan, serta fragmentasi kawasan ASEAN memperlihatkan bahwa posisi Indonesia sebagai middle power berada dalam kondisi rentan di tengah struktur internasional yang semakin bipolar. Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia bukan hanya menjaga kedaulatan formal, tetapi memperkuat ketahanan nasional agar mampu bertahan dan beradaptasi terhadap tekanan geopolitik global.

KESIMPULAN

Kompetisi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana kawasan ini menjadi pusat perebutan pengaruh dalam tatanan internasional yang semakin multipolar. Rivalitas tersebut berlangsung di berbagai dimensi militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi serta berdampak langsung pada stabilitas dan arah perkembangan

kawasan. Amerika Serikat menegaskan dominasinya melalui strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP), sementara Tiongkok memperluas pengaruh dengan Belt and Road Initiative (BRI) dan langkah agresif di Laut Cina Selatan. Bagi negara-negara Asia Tenggara, dinamika ini menghadirkan peluang berupa investasi dan kerja sama, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa dilema geopolitik.

Melalui perspektif realisme struktural, strategi Indonesia dapat dipahami sebagai respon rasional dari sebuah middle power dalam sistem internasional yang anarkis. Indonesia berusaha meminimalkan risiko, memaksimalkan keuntungan, dan menjaga stabilitas kawasan di tengah distribusi kekuatan global yang semakin bipolar. Namun demikian, keterbatasan kapabilitas domestik dan tekanan geopolitik menunjukkan bahwa strategi ini harus terus diiringi dengan penguatan ekonomi, diplomasi, dan pertahanan nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi objek perebutan pengaruh, tetapi juga mampu tampil sebagai aktor penting yang berdaya dalam menentukan arah masa depan kawasan Indo-Pasifik.bukan ringkasan. Kesimpulan utama dari penelitian ini dapat disajikan dalam bagian Kesimpulan singkat, yang dapat berdiri sendiri atau membentuk subbagian dari bagian Diskusi atau Hasil dan Diskusi. Selain itu, juga dapat ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek penerapan studi lebih lanjut ke selanjutnya (berdasarkan hasil dan diskusi).

REFERENSI

Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Stabilizing the Indo-Pacific or Just Reinventing the Wheel? *Asia Policy*, *15*(2), 46–50.

Bank, W. (2023). *World Development Indicators 2023: Indonesia Country Profile*. World Bank.

Buszynski, L. (2019). *Geopolitics and the Western Pacific: China, Japan and the US*. Routledge.

Buszynski, L., & Hai, D. T. (2021). *Maritime Issues and Regional Order in the Indo-Pacific*. Routledge.

Carr, A. (2014). *Is Australia a Middle Power?* World Scientific.

Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Dollar, D. (2019). China's Belt and Road Initiative: Motives, Scope, and Challenges. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1–12.

Goh, E. (2013). *The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold War East Asia*. Oxford University Press.

Hillman, J. E. (2021). *The Digital Silk Road: China's Quest to Wire the World and Win the Future*. HarperCollins.

Institute, I. I. (2023). *The State of Southeast Asia 2023 Survey Report*. ISEAS.

Kuik, C.-C. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia*, *30*(2), 163–185.

Kuik, C.-C. (2021). Hedging in Post-Pandemic Asia: Lessons from Southeast Asia's Middle Powers. *International Affairs*, *97*(6), 1739–1756.

Laksmana, E. A. (2013). Indonesia's Defense Diplomacy in Practice: The Garuda Shield Exercise. *Contemporary Southeast Asia*, *35*(2), 228–250.

Lohman, W. (2013). The U.S. Alliance System in Asia. *The Heritage Foundation*

Backgrounder, *2816*, 1–10.
Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680*. Yale University Press.
Shambaugh, D. (2020). *Where Great Powers Meet: America and China in Southeast Asia*. Oxford University Press.
Solís, M. (n.d.). The Indo-Pacific Economic Framework: Opportunities and Challenges. In *Brookings Policy Brief*.
Sukma, R. (2010). Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties. *Security Challenges*, *6*(2), 33–34.
Sukma, R. (2020). Indonesia's Bebas-Aktif Foreign Policy and the Indo-Pacific: Navigating Great Power Rivalries. *Journal of International Affairs*, *73*(2), 67–70.
Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security*, *9*(4), 3–43.
Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley.